

SKRIPSI
PERANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN



OLEH:

Ibnu Saputra
NPM. 2010012111048

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA



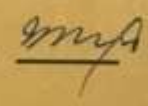
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 02/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Ibnu Saputra
NPM : 2010012111048
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Peranan Dinas Perikanan Dan Pangan Dalam
Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir
Selatan

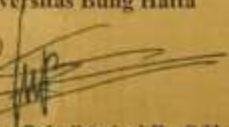
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

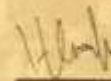
PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 02/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Ibnu Saputra
NPM : 2010012111048
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perikanan dan Pangan Dalam
Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir
Selatan

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Helmi Chandra Sy, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ibnu Saputra¹, Helmi Chandra SY¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: ibnusaputra0702@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menyatakan bahwa menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Peranan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala/hambatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Bagaimana upaya Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?. Metode penelitian menggunakan metode hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini 1) Peranan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberdayaan nelayan, belum berjalan dengan optimal, Dinas Perikanan dan Pangan memberikan bantuan yaitu penyediaan sarana dan prasarana masyarakat nelayan seperti Perahu Jukung, alat tangkap ikan dan mesin tempel, Dinas Perikanan dan Pangan memberikan penyuluhan kepada kelompok nelayan seperti memberikan Penyuluhan dan Pendampingan. 2) Kendala/penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : Keterbatasan anggaran dan Rendahnya sumber daya manusia. 3) Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan nelayan yaitu: Meningkatkan anggaran dan Meningkatkan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Peranan, Pemberdayaan, Nelayan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, islam dan juga kesehatan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, Nabi yang diutus sebagai *Uswatun Hasanah* bagi seluruh alam semesta. Yang telah meninggalkan dua pedoman hidup Al-Qur'an dan Sunnah, agar manusia senantiasa berpegang teguh pada keduanya.

Alhamdulillah dengan ketabahan dan do'a serta penuh rasa percaya diri sendiri, berkat bimbingan dan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan, nasehat dan arahan, serta kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT. sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Bapak **Helmi Chandra SY S.H., M.H** selaku Pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Maka dengan itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H**
5. Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu dalam proses kegiatan akademik penulis selama mengikuti perkuliahan Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.**
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Staf Karyawan/I dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Almamaterku tercinta dan saya banggakan tempat saya menimba ilmu dan mengasah ilmu di Universitas Bung Hatta, semoga selalu jaya, juara, maju dan berkualitas.
9. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Bapak **Firdaus, S.Pi, M.Si**
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Bapak **Afirman Julta, S.Pi**
11. Fungsional Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Ibu **Silvina Granita S.Pi**
12. Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan Bapak **Sarial**

13. Terkhusus dan teristimewa penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tidak ada habisnya kepada Kedua Orang Tua tercinta, Papa Gasrial dan Mama Yurlinda yang tidak ada hentinya memanjatkan do'a kepada Allah SWT, memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, tanpa menghiraukan rasa lelah dan letih terus memberikan yang terbaik untuk putranya, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan dari kecil hingga sekarang.
14. Terimakasih kepada Abang Ismul Akhzam S.Sos dan keluarga yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi.
15. Terimakasih kepada Adik Ikhwal Azyura yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
16. Terimakasih Kepada Komandan, Wakil Komandan dan seluruh Staf Batalyon 106 MahaYudha Universitas Bung Hatta yang telah memberikan dukungan buat penulis.
17. Terimakasih Sahabat terbaik Ricko Pernando, Muhammad Arif, Muhammad Mukramin, Desi Amelia, dan Nurul Hasanah, S.Pd yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi tetap dihati yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Terimakasih Evita Riskiah, S.Pd yang telah. menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberi semangat untuk terus maju dalam meraih apa yang menjadi impian penulis.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Agustus 2024

Penulis

Ibnu Saputra
NPM.2010012111048

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Dinas Perikanan.....	8
1. Tugas dan Wewenang Dinas Perikanan.....	8
2. Fungsi Dinas Perikanan.....	9
B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan.....	9
1. Pengertian Pemberdayaan.....	9
2. Tinjauan Pemberdayaan.....	12
3. Macam-macam Pemberdayaan.....	13
4. Proses pemberdayaan.....	14
5. Strategi pemberdayaan.....	15
C. Tinjauan Tentang Nelayan.....	16
1. Pengertian Nelayan.....	17
2. Jenis-jenis Nelayan.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Peranan Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan....	22
B. Kendala/hambatan Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	42
C. Upaya Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Nelayan	44

BAB IV PENUTUP	51
-----------------------------	-----------

A. Simpulan	51
-------------------	----

B. Saran	51
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan. Dalam Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di Bidang Perikanan.

Dalam hal ini Dinas Perikanan yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam mengurus segala urusan perikanan harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat nelayan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menyatakan bahwa menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan. Sesuai bidang pemberdayaan nelayan Pasal 15 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitas kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun Renja Sarana dan Prasarana Nelayan sesuai dengan tugas pokok;
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- c. Menyiapkan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- d. Melaksanakan pemberian kemudahan akses dalam pemberian informasi tatacara meningkatkan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pemberian Sarana dan Prasarana Nelayan;
- g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan jumlah penduduk 515.549 jiwa pada tahun 2021. Ibu kota Pesisir Selatan tepatnya terletak di Kecamatan

IV Jurai Painan. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pesisir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer.¹

Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan cukup aktif dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Nelayan memiliki beberapa kategori, ada nelayan besar dan ada nelayan kecil, ada nelayan dengan modal usaha besar ada juga nelayan dengan modal usaha kecil. Melihat banyaknya potensi laut yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, mata pencarian masyarakat nelayan yang bertumpu kepada potensi laut harus sejahtera. Standar hidup dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan selatan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan sumber daya perikanan. namun pada kenyataannya kemiskinan merupakan faktor dalam kehidupan masyarakat nelayan, bahkan seringkali dikaitkan dengan kehidupan nelayan.

Melihat banyaknya masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, di pandang perlunya kebijakan-kebijakan pembangunan dan pengembangan khususnya pemberdayaan nelayan yang dilakukan dinas perikanan dan pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Sejalan dengan itu, konteks seperti pemberdayaan nelayan.

Sejalan dengan hal diatas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di harapkan menjalankan peran yang telah diberikan untuk memberdayakan nelayan dan juga di harapkan harus teliti, fokus, dan peka melihat persoalan mendasar nelayan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

¹ Winsyah, 2004, Deretan Kabupaten Paling Rendah di Provinsi Sumatera Barat, Nomor 1 Wilayahnya Ternyata Sangat Rendah dengan Garis Pantai Sepanjang 218 Kilometer. Diakses dari <https://www.harianhaluan.com>

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat lebih ditingkatkan dan lebih diperhatikan lagi. Sehingga dengan peningkatan pemberdayaan nelayan tersebut dapat mengubah pola kehidupan masyarakat yang dulunya masyarakat kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya, masyarakat yang dulunya tidak sejahtera menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang mampu. Memberikan kemampuan kepada nelayan untuk memenuhi kebutuhannya, merencanakan, dan menjalankan operasinya pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan nelayan. Namun dalam mewujudkan hal tersebut, apakah Pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan perannya dalam memberdayakan nelayan secara tepat dan sesuai kebutuhan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Perikanan dan Pangan Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Pesisir Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala/hambatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana upaya Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Peranan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisa apa saja kendala Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisa upaya Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data yang konkrit, diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.²

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis Penelitian, data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang akan di bahas.³ Yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

² Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 126.

³ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.) hlm. 30

terkait peranan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan .

b. Data Sekunder.

Data skunder adalah data-data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini adalah data – data yang di peroleh dari hasil penelitian. Data sekunder yang mencakup dokumen – dokumen, buku – buku dan gambar.⁴ Data Sekunder terbagi menjadi 3 bagian:

- a. Bahan hukum Primer
- b. Bahan hukum Sekunder
- c. Bahan hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia. Dokumen - dokumen yang dapat dikumpulkan berupa transkrip wawancara, gambar dan dokumen-dokumen lain terkait peranan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

b. Wawancara.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar

⁴ Ibid, hlm. 30-31.

pertanyaan dan dapat di kembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Bapak Afirman Julta S.Pi, Fungsional Sarana dan Prasarana Ibu Silvina Granita S.Pi, Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Ibu Fenny dan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Sarial.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, data primer maupun data sekunder dianalisa secara deskriptif kualitatif. Setelah itu dilakukan pemilahan dan penyederhanaan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas, menuangkannya dalam bentuk kalimat dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.